

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah kegiatan serentak yang dilakukan secara demokrasi dan dipilih langsung oleh masyarakat demi terciptanya negara yang demokratis. Di Indonesia, Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955, akan tetapi hanya pemilihan anggota legislatif.

Pemilihan Presiden (Pilpres) dilakukan pertama kali setelah terjadinya Super Semar pada tahun 1966, pada waktu itu sekaligus runtuhnya Orde Lama atau yang bisa dikenal dengan Orde Terpimpin.

Pemilihan Presiden dipilih melalui MPR RI dari tahun 1970-1999. Pada tahun 2004, Pemilihan Presiden dipilih langsung oleh masyarakat. Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Merupakan Presiden RI pertama yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Menurut Roffi, pemilihan umum merupakan salah satu prasyarat atau prinsip dasar untuk membentuk pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Pemilihan Umum merupakan perwujudan nyata dari gagasan negara demokrasi. Dengan kata lain, pemilihan umum merupakan alat yang sangat penting dalam demokrasi. (Roffi, 2020:1)

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara republik maka kekuasaan pemerintah di Indonesia dipimpin oleh seorang

Presiden. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 2 Ayat 1 yang dimana Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Selama pelaksanaan Pemilihan Presiden secara langsung, banyak terjadi kulturasi masyarakat di Kabupaten Banyumas yang menurut peneliti banyak sekali perubahan karena dukungan yang berbeda.

Di Kecamatan Purwokerto Timur yang sering melaksanakan kegiatan kampanye setiap koalisi Partai Politik (Parpol) dalam mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertepatan di GOR Satria Kabupaten Banyumas. Dan aktivitas kegiatan selain kampanye juga terdapat aktivitas pemasangan beberapa bendera partai politik pengusung seperti PDI-P karena kalangan masyarakat yang banyak mendukung partai tersebut karena beberapa suatu hal yang menyebabkan partai pengusung lawan kewalahan dalam mendapatkan suara di kecamatan Purwokerto Timur.

Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai dampak sosial kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas pada saat Pemilihan Presiden 2019 secara langsung maupun sebelum pelaksanaan pemilihan dimulai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa profil Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik di Kab. Banyumas ?
2. Bagaimana sistem Pemilihan Presiden 2019 di Kecamatan Purwokerto Timur ?

3. Bagaimana kondisi dampak sosial pada saat pelaksanaan dan setelah Pemilihan Presiden 2019 di Kecamatan Purwokerto Timur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui profil Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui alur dan mekanisme Pemilihan Presiden 2019 di Kecamatan Purwokerto Timur.
3. Untuk mengetahui dampak polarisasi di kecamatan Purwokerto Timur pada saat keberlangsungan dan setelah Pemilihan Presiden 2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang sangat berarti secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

A. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca mengenai dampak sosial kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas di dalam pelaksanaan maupun setelah Pemilihan Presiden 2019.

B. Kemudian, juga memberikan informasi bagi penelitian yang akan mengambil penelitian tentang perkembangan Pemilihan Presiden 2019 di Kecamatan Purwokerto Timur.

## **2. Manfaat Praktis**

- A. Memberikan kontribusi di dalam sumber-sumber tertulis yang mengandung informasi tambahan bagi penelitian yang sejenis.
- B. Memberikan input kepada Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat untuk memberikan dokumen serta peningkatan sumber daya manusia.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pemilihan Presiden**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden adalah semua jabatan yang dapat dipilih berdasarkan UUD 1945. Proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pejabat eksekutif lebih spesifik dituangkan dalam Pasal 6A UUD 1945 terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur secara lebih rinci dalam pasal 6A uud 1945 dijabarkan ke dalam lima ayat berikut :

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat

2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang (UUD 1945).

Dalam sistem pemilihan Presiden, Batas kursi minimum tertentu harus dicapai dalam sistem pemilihan presiden untuk mengajukan calon. Ambang perolehan suara, atau sekadar ambang batas, adalah yang digunakan untuk menggambarkan hal ini.

Tujuan diadakannya ambang batas, yang dalam hal ini presidential threshold adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial.

Menurut Roffi, karena membatasi pencalonan calon presiden, pengaturan calon presiden yang harus mencapai ambang batas (jumlah kursi minimum) yang dipersyaratkan dalam sistem pemilihan presiden biasanya sulit diterima oleh partai politik tertentu. Akibatnya, beberapa pihak baik swasta maupun pimpinan partai mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejauh tuduhan dalam gugatan tersebut semuanya menyerukan penerapan ambang batas presidensial yang melanggar hak politik pribadi individu dan partai politik, gugatan itu juga menyerukan pernyataan bahwa legislatif keliru dalam memperluas aturan yang mengatur bagaimana pemilihan presiden dilakukan, sebagaimana diwajibkan oleh pasal 6A UUD 1945.(Roffi, 2020:6).

## **2. Sistem Pemerintahan**

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV disebutkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dibentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Beginilah sistem pemerintahan Indonesia beroperasi.

Republik Indonesia adalah negara kesatuan berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Oleh karena itu, dapat diduga bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari

kata pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara.

Tatanan pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 sebenarnya merupakan sistem campuran, hal ini dapat dilihat dari struktur dan sejarah penyusunannya. Namun, sistem parlementer model Inggris dan sistem Presidensial Amerika Serikat tidak digabungkan dalam sistem campuran ini. Sesuai dengan konstitusi kolonial Hindia Belanda tahun 1945, sistem Pemerintahan Campuran adalah sistem pemerintahan sosialis yang meniru Uni Soviet atau baru Negara Rusia.

Bangsa Indonesia berkomitmen membangun sistem politik yang demokratis saat memasuki fase transformasi ini. Oleh karena itu, suatu pemerintahan konstitusional atau suatu pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi harus dibentuk. Atribut konstitusional bahwa konstitusi negara memberikan batasan pada otoritas pemerintah atau eksekutif dan jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara mendefinisikan pemerintahan konstitusional.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR RI sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini.

### **3. Masyarakat**

Menurut Prasetyo D., dan Irwansyah (2020), secara umum pengertian masyarakat adalah sukumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Sedangkan pengertian masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian Masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginnya memberikan reaksi dalam lingkungannya.

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan Eka Sri Mailyu (2020) berjudul “Dampak Informasi Hoaks Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019 (Study Pada Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola penyebaran informasi yang terjadi pada saat Pemilihan Presiden 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam

pelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Andi Akbar (2017) yang berjudul “Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukamba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukamba) dari Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui seberapa pengaruh terjadinya adanya Money Politic atau adanya pembagian uang demi kemenangan setiap calon di kalangan masyarakat yang berada di Desa Barugae, Kabupaten Bulukamba.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa oservasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Aminul Hasan (2008) berjudul “Pengaruh Media Terhadap Tingkat Partisipasi Politik (Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Ciputat Pada Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006)” dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media yang akan mempengaruhi peningkatan partisipasi politik pada saat Pilkada Provinsi Banten yang penelitiannya berada di Ciputat pada tahun 2006.

Terakhir, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bustami Kamil (2020) yang berjudul “Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PW-XI/2013)” dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui adanya keterhubungan sistem presidensial yang selama ini dilakukan pada saat Pemilihan Umum dan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 14/PW-XI/2013.

Dari beberapa penelitian yang sudah dikemukakan diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu objek penelitian berupa mekanisme pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019 beserta dampak sosial yang terjadi terhadap masyarakat di Kabupaten Banyumas.

### **G. Kajian Teori dan Pendekatan**

Kajian teori merupakan teori-teori yang dianggap paling relevan untuk menganalisis objek. Sebagai alat teori bisa dianggap paling memadai, paling tepat, baik dalam kaitannya dengan hakikat objek maupun pembaharuan teori itu sendiri. Dalam penelitian yang akan penulis teliti dengan judul “Dampak Pemilihan Presiden 2019 Di Kabupaten Banyumas Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Banyumas” maka teori yang digunakan yaitu :

#### **1. Teori Struktural Fungsional**

Fungsionalisme adalah sudut pandang yang luas dalam ilmu manusia yang berupaya menguraikan masyarakat sebagai desain dengan bagian-bagian yang saling terkait. Menurut fungsionalisme, masyarakat secara keseluruhan dipahami dalam kaitannya dengan fungsi komponen individualnya, khususnya norma, adat, tradisi, dan institusi. Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana

berfungsinya suatu struktur. Teori struktural fungsional memiliki asumsi dasar yaitu :

Pertama, setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif stabil dan menyakinkan. Kemudian elemen yang telah terstruktur tersebut terintergrasi dengan baik. Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Terakhir yaitu setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada konsensus nilai diantara para anggotanya.

Untuk memahami permasalahan yang akan diteliti mengenai kondisi dampak sosial terhadap masyarakat yang merasakan situasi pada saat pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019 di Kabupaten Banyumas maka menggunakan teori struktural fungsional. Di dalam teori struktural fungsional dijelaskan mengenai elemen-elemen yang terstruktur dan adanya saling integrasi dengan baik.

## **2. Pendekatan**

Secara definitif, pendekatan diartikan sebagai cara mendekati, sehingga hakikat objek dapat diungkapkan se jelas mungkin. Pendekatan diartikan sebagai sifat suatu ilmu pengetahuan, melalui objek diungkapkan secara lebih objektif. Pendekatan juga diartikan sebagai cara-cara yang seolah-olah sudah relatif baku, digunakan dalam berbagai disiplin, seperti emik-etik, bentuk-isi, intrinsik-ekstinsik, dan bentuk-fungsi-makna. (Ratna, 2010:293).

Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian berjudul

*“Dampak Pemilihan Presiden 2019 Di Kecamatan Purwokerto Timur*

*Terhadap Dampak Polarisasi Di Dalam Masyarakat*” adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis pada dasarnya dapat dilakukan terhadap keseluruhan objek. Pendekatan sosiologis dapat dikatakan bersifat umum sebab segala sesuatu ada kaitannya dengan masyarakat, segala sesuatu dihasilkan oleh masyarakat. Pendekatan sosiologis menjelaskan hakikat masyarakat sekaligus implikasinya terhadap suatu penelitian, baik secara praktis maupun teoritis. Penulis memilih pendekatan sosiologis dengan maksud bahwa penelitian yang akan diteliti merupakan penelitian yang menyangkut dengan masyarakat khususnya terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Peneliti akan melakukan penelitian yang fokusnya adalah dampak sosial terhadap masyarakat pada saat Pemilihan Presiden berlangsung maupun setelah pelaksanaan.

Selain pendekatan sosiologis, peneliti juga menggunakan pendekatan politik untuk meneliti permasalahan kontestasi Pemilihan Presiden 2019 yang diawali dengan pendaftaran, partai yang akan mengusung dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat kabupaten Banyumas pada saat kampanye, pemilihan, dan penghitungan suara.

Pendekatan politik yang akan diambil lebih cenderung ke pendekatan Komunikasi politik. Menurut Astrid S. Soesanto, komunikasi politik ialah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga pada masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik (Soesanto dalam Pureklolon, 2016:4).

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah karena berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada masa lampau. Dalam hal ini metode penelitian sejarah mencakup 4 hal, yaitu :

### **1. Heuristik**

Kata Heuristik berasal dari kata “Heuriskein” dalam bahasa Yunani yang berarti mencari atau menemukan dalam bahasa latin. Heuristik merupakan tahapan yang dimana peneliti mengumpulkan berbagai jejak-jejak masa lalu. Sumber sejarah terbagi menjadi 3 yaitu sumber lisan, sumber tulisan, dan sumber benda. Di dalam permasalahan yang akan diteliti, peneliti lebih berfokus pada pencaharian sumber tulisan dan lisan.

Pencarian sumber tulisan meliputi studi dokumen dengan sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas. Kemudian studi pustaka dengan sasaran yaitu Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, buku-buku yang relevan dan Internet. Untuk sasaran pencarian sumber lisan penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang memilih calon Presiden pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 di Kecamatan Purwokerto Timur.

### **A. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Selain itu bisa dikatakan bahwa wawancara adalah

percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi yang dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Pada penelitian yang akan dilakukan mengenai pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019 yang pernah dilaksanakan di Kecamatan Puwokerto Timur dan pembahasan mengenai dampak kehidupan sosial terhadap masyarakat Kabupaten Banyumas. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu masyarakat yang tinggal di Kabupaten Banyumas. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai perkembangan pada saat pelaksanaan dan setelah Pemilihan Presiden 2019. Selain itu juga membahas situasi kondisi kehidupan sosial pada saat masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang dilakukan di Kecamatan Purwokerto Timur.

## **B. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik yang paling banyak dilakukan dalam penelitian. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau subjek yang akan diteliti. Ada poin tertentu dalam observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati itu.

Didalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi yang dilakukan secara langsung dengan cara terjun

langsung ke lokasi objek penelitian yaitu lingkungan masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas. Observasi ini dilakukan guna memperoleh informasi secara langsung bagaimana pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019 berlangsung dan juga mengamati kondisi kehidupan sosial di wilayah yang sedang diteliti.

### **C. Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi melalui sumber tertulis seperti arsip, catatan harian, majalah, autobiografi, surat-surat pribadi dan lain sebagainya. Selain itu, dokumen juga bisa berbentuk foto, gambar maupun artefak. Studi dokumen juga diperlukan guna memberikan tambahan informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian yang akan dilakukan mengenai perkembangan kehidupan masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019 dan juga melihat kondisi kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Banyumas, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen ini nantinya akan peneliti jadikan sebagai sumber sekunder. Studi dokumen akan peneliti jadikan sebagai tambahan informasi yang nantinya berguna untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Sasaran studi dokumen ini yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk memperoleh tambahan informasi berkaitan tentang total jumlah suara Calon Presiden dan Wakil Presiden pada saat Pemilihan Umum 2019 yang dilaksanakan di Kecamatan Purwokerto Timur.

#### **D. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tempat-tempat hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Jadi studi pustaka merupakan teeknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber dari penelitian ataupun catatan yang bersifat valid sehingga penelitian penelitian yang dihasilkan juga valid. Studi pustaka juga bisa digunakan sebagai sumber primer atau sekunder. Sumber-sumber tersebut bisa diperoleh di perpustakaan, pusat arsip maupun dinas terkait.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi pustaka yang pengambilan data diperoleh dari Perpustakaan Kabupaten Banyumas, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Studi pustaka dilakukan untuk melengkapi teori-teori serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **2. Kritik**

Kritik adalah penerapan seperangkat aturan dan prinsip untuk mengevaluasi kebenaran dan kredibilitas sumber sejarah dan mengembalikannya ke bentuk aslinya dan nilai bukti aktual. Analisis dilakukan ketika ahli sejarah telah mendapatkan hotspot yang disusun untuk penelitian, sebelum sumber tersebut digunakan, analis atau ahli barang antik harus mengetahui kredibilitas dan ketelitian sumber tersebut. Kritik dibagi menjadi 2 yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

### **A. Kritik Ekstern**

Kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Kritik eksternal ingin menguji keaslian suatu sumber yang sungguh-sungguh asli dan bukan tiruan atau palsu. Sumber yang asli biasanya waktu dan tempatnya diketahui. Makin luas dan makin dapat dipercaya pengetahuan kita mengenai suatu sumber, akan makin asli sumber itu.

Dalam mendapatkan data mengenai penelitian ini, penulis mendatangi informan-informan yang akan dijadikan sumber lisan. Peneliti mendatangi informan yang benar-benar pantas untuk diwawancarai mengenai penelitian penulis terutama terkait dengan proses pelaksanaan dan situasi kehidupan sosial pada saat Pemilihan Presiden 2019. Penggunaan sumber lisan dikarenakan peneliti juga membandingkan data dari sumber lisan satu dengan yang lainnya. Tidak dapat diduga bahwa dalam wawancara ada hasil yang subjektif yang dilakukan oleh beberapa informan. Oleh karena itu, data yang diperoleh tidak langsung dapat dipercaya.

Data yang diperoleh pada tahap heuristik tidak semuanya dapat digunakan setelah melalui tahap kritik karena banyak data yang tidak lulus dalam proses ini. Peneliti berusaha untuk memilah data yang diperoleh dan benar-benar menilai keotentikan data.

### **B. Kritik Intern**

Sangat berbeda dengan kritik eksternal yang lebih cenderung membahas pada uji fisik suatu dokumen, kritik internal ingin menguji lebih jauh lagi

mengenai isi dokumen. Ialah ingin mempertanyakan apakah isi informasi yang terkandung dalam suatu dokumen benar dan dapat dipercaya, kredibel dan realibel. Sebagai suatu kritik, kritik internal lebih tinggi.

Setelah selesai menguji otentitas (keaslian) suatu sumber, maka peneliti atau sejarawan harus melangkah ke uji yang kedua, ialah uji kredibilitas atau sering juga disebut uji reliabilitas. Artinya peneliti atau sejarawan harus menentukan seberapa jauh dapat dipercaya kebenarannya dari isi informasi yang di sampaikan oleh suatu sumber atau dokumen sejarah.

Setelah sumber dalam penelitian ini ditetapkan keabsahannya, dilakukan kritik internal, dan peneliti kemudian mengevaluasi sumber tersebut berdasarkan isinya. Peneliti akan mengevaluasi apakah sumber tekstual yang mereka gunakan untuk melakukan penelitian mereka memberikan informasi yang dapat dipercaya atau tidak. Peneliti mencoba untuk membandingkan satu sumber dengan yang lain ketika mengevaluasi keandalan sumber untuk menunjukkan apakah bahan tertulis itu khas untuk masanya. Dalam kajian ini, kritik internal cukup membantu dalam menentukan kebenaran fakta yang diperoleh dari teks buku dan publikasi.

Pada sumber lisan, penulis berusaha membandingkan hasil dan keterangan wawancara yang penulis peroleh antara satu informan dengan informan lainnya. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dari setiap keterangan yang informan berikan. Hasil kritik intern dalam wawancara penulis menemukan bahwa keterangan yang diberikan informan relevan dengan masalah yang dikaji penulis yaitu terkait dampak sosial ketikan pelaksanaan dan setelah pemilihan Presiden 2019 di Kabupaten Banyumas.

### **3. Interpretasi**

Makna diberikan pada fakta atau bukti sejarah melalui interpretasi. Penafsiran diperlukan karena materi sejarah pada hakekatnya berfungsi sebagai saksi bisu atas realitas masa lalu. Bukti sejarah, saksi, atau fakta tidak dapat berbicara sendiri tentang apa yang terlihat di masa lalu.

Didalam penelitian ini interpretasi data yang dilakukan adalah untuk menjelaskan gambaran masyarakat di Kabupaten Banyumas, Teknis pelaksanaan selama Pemilihan Umum 2019, serta dampak sosial yang terjadi kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Banyumas.

### **4. Historiografi**

Merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah. Penulisan cerita sejarah dari hasil penelitian dan interpretasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip realisasi atau cara membuat urutan peristiwa, kronologi, atau urutan waktu, kausalitas atau hubungan sebab akibat dan kemampuan imajinasi yaitu kemampuan untuk menggabungkan peristiwa yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian.

Penulisan sejarah (historiografi) menjadi sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (verifikasi), dan diinterpretasi. Tahap akhir dari penulisan skripsi ini adalah penulisan mengenai “Dampak Sosial Terhadap Pemilihan Presiden 2019 Kepada Masyarakat Banyumas”.

## **I. Sistematika Penyajian**

Hasil penelitian ini disusun dengan sistematikan sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, kajian teori dan pendekatan, metode penelitian, dan sistematikan penyajian.

Bab kedua. Bab ini menjelaskan profil Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik yang terdaftar di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019.

Bab ketiga, Bab ini menjelaskan tentang teknis pelaksanaan Pemilihan Presiden pada saat Pemilihan Umum 2019 di Kecamatan Purwokerto Timur.

Bab keempat. Bab ini merupakan penjelasan mengenai dampak sosial yang terjadi di masyarakat pada saat pelaksanaan dan setelah Pemilihan Presiden ketikan Pemilihan Umum 2019 di Kecamatan Purwokerto Timur.

Bab kelima Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi uraian singkat mengenai dampak sosial terhadap masyarakat pada saat Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Banyumas.